

## **PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK DI KOTA PALU**

### ***(THE PARTICIPATION OF WOMEN IN POLITICAL PARTIES AT PALU CITY)***

**Samsinar Z. Moga**

#### **Abstrak**

---

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Partisipasi Perempuan dalam Partai Politik di Kota Palu. Metode penelitian bersifat kualitatif dengan 5 informan yang dipilih secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa partisipasi perempuan dalam partai politik di kota Palu belum berjalan dengan baik karena ada 5 dimensi yang diamati di lapangan, yaitu; Memilih Kegiatan, Melobi, Kegiatan Organisasi, Pencarian Koneksi dan Aksi Kekerasan tidak dilakukan dengan baik karena posisi penawaran wanita masih rendah dan selalu menjadi nomor dua. Dari hasil penelitian, penulis dapat menyatakan bahwa partai politik di kota Palu tidak memberikan ruang maksimal bagi perempuan, meski memiliki kapasitas maksimal secara intelektual dan profesional dalam melobi dan melakukan kegiatan partai lainnya.

---

**Kata kunci:** Partisipasi, Perempuan, Partai Politik, Kota Palu

#### ***Abstract***

---

*This research was aimed to analyse The Participation of Women in Political Parties at Palu City. The research method was qualitative with 5 informants which chosen in sampling purposively. The technique of data collection in the research used observation, interview and documentation. The research result explained that the participation of women in political parties at Palu city have not been run well because there were 5 dimension observed in the field, namely; Selecting Activity, Lobbying, Organization Activity, Connection Searching and Violence Action were not done well because the offer position of women was still low and always be the number two. From the research result, the writer can express that the political parties at Palu city did not give maximum space for women, even though they have maximum capacity intellectually and professionally in lobbying and doing other party activities.*

---

**Keywords:** *Participation, Women, Political Parties, Palu city*

## **PENDAHULUAN**

Masalahnya sangat jelas yakni ada kelompok masyarakat yang berjenis kelamin perempuan yang tidak banyak dilibatkan dalam proses-proses politik, Peran Perempuan dalam Partai Politik Di Kota Palu

Kiprah perempuan dalam politik di era reformasi mulai berubah kearah yang positif setelah hadirnya UU No. 12 tahun 2003 tentang partai politik, dalam pasal 65 ayat (1), partai politik dianjurkan untuk mencalonkan 30% kaum perempuan untuk duduk di kursi legislatif (DPR, DPD, DPRD I dan DPRD II), merupakan sebuah legitimasi politik Negara yang harus dimanfaatkan sebagai momentum politik bagi perempuan dalam mengartikulasikan kemampuannya sebagai makhluk Tuhan yang di ciptakan dengan potensi yang sama tinggi dan sama derajat dengan kaum laki-laki untuk turut memecahkan persoalan bangsa dalam berbagai bidang dan sektor kehidupan berbangsa dan bernegara dan juga sebagai manifestasi peran perempuan dalam politik praktis.

Kesempatan ini jelas adalah peluang emas, setelah sekian lama perempuan ada dalam bayang-bayang superioritas politik dikotomi perempuan *versus* laki-laki. Laki-laki dalam kurun waktu yang cukup lama dipandang sebagai subyek yang mengatur atau yang paling berhak dalam ranah publik. Laki-laki kemudian hampir keseluruhan bidang menguasai peran-peran penting, sementara pada saat yang sama perempuan terus diperankan sebagai pelayan yang membantu kerja laki-laki.

Adapun peran domestik perempuan hanya berurusan dengan “kasur dan dapur” jelas adalah pemasungan paradigma yang mengkhianati hak-hak azasi manusia sebagai ciptaan Tuhan, yang diciptakan dengan potensi yang sama. Perempuan jelas memiliki kemampuan yang sama karena itu semangat penghapusan dikotomi gender dalam pemerintahan KH. Abdurahman Wahid melalui Inpres No. 9 Tahun 2000 adalah sebuah *good will* politik yang menghapus perbedaan gender dalam pembangunan nasional adalah langkah maju yang positif.

Jumlah penduduk Kota Palu Tahun 2011 sebesar 313,179 jiwa di mana 157,223 jiwa adalah laki-laki atau sebesar 50.20 persen dan 155,956 jiwa adalah perempuan sebesar 49.80 persen. Untuk anggota DPRD Kota Palu sebanyak 30 orang, dengan 6 orang perempuan serta 38 partai politik dengan pengurus 1.720 orang, dari jumlah tersebut terdapat 418 orang perempuan, namun hanya 190 orang menjadi elit partai (posisi yang diperhitungkan, seperti wakil ketua, sekretaris dan ketua bidang). Dari 38 partai hanya 1 orang yang menjadi ketua partai (Partai Amanat Nasional).

Sangat terlihat prosentase perempuan di Kota Palu pada kepemimpinan partai sangat rendah. Masalahnya, karena rata-rata Parpol yang ada kurang memahami perlunya merekrut lebih banyak kader perempuan, kebanyakan perempuan yang menjadi pengurus parpol hanya menjadi anggota biasa. kebanyakan parpol akan mempersyaratkan ‘pengalaman berorganisasi’ sebagai salah satu kriteria untuk menjadi anggota atau untuk menduduki posisi pucuk kepemimpinan partai, sejauh ini juga belum pernah ada strategi terpadu untuk ‘memikat’ kaum perempuan ke dalam parpol, tidak pernah ada program untuk mensosialisasikan perempuan anggota partai dan melatih mereka untuk menjadi kader partai yang trampil dan berkualifikasi tinggi. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka Rumusan Masalah dijabarkan dalam bentuk pertanyaan, “Bagaimana Partisipasi Perempuan dalam Partai Politik di Kota Palu?”

Berdasarkan Rumusan Masalah, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian untuk mengetahui partisipasi politik perempuan dalam partai Politik di Kota Palu.

## **METODE**

Penelitian merupakan suatu proses mencari kebenaran secara sistematis dalam waktu dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku. Dilihat dari jenisnya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2000), penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penelitian kualitatif yang dimaksudkan dalam penelitian ini, lebih mendekati arah bimbingan penyusunan teori substantive yang berdasarkan data. Penelitian kualitatif menekankan pada

kepentingan untuk melakukan penyesuaian dengan situasi dan kondisi atau obyektif lapangan (lokasi penelitian), dengan kekuatan interpretasi.

Desain yang digunakan dalam pendekatan kualitatif tersebut adalah deskriptif-interpretatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan kejadian yang dapat diamati (Moleong 2000). Selain itu deskriptif-interpretatif juga merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, institusi, komunitas, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nasir 1988).

Dengan demikian data yang diperoleh dalam penelitian ini akan diuraikan secara deskriptif (apa adanya) untuk kemudian diinterpretasikan berdasarkan kecenderungan situasi dan kondisi obyektif dari hasil pengamatan dan data (dari pelaku dan informan serta data sekunder) yang diperoleh.

Jumlah Informan sebanyak 9 orang berdasarkan Metode yang digunakan dalam memilih informan adalah purposive sampling Menurut Singarimbun dan Sofian (1989) sampel bertujuan atau purposive sampling dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara: (1) observasi, (2) wawancara, (3) dokumentasi. Sementara teknik dalam menganalisis data menggunakan analisis kualitatif untuk mendeskripsikan karakteristik variabel yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi politik merupakan salah satu syarat utama demi tegak dan berjalannya demokrasi. Demokrasi juga berarti keikutsertaan seluruh komponen masyarakat dalam menentukan arah dan kebijakan negara. Sedangkan sebagai defenisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok secara sukarela untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa atau mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan / atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*publicpolicy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, mencalonkan diri menjadi anggota parlemen.

Untuk mendapatkan gambaran tentang partisipasi perempuan dalam partai politik di Kota Palu, secara jelas, penulis menggunakan pendekatan teori yang bersumber dari Huntington dan Nelson (1994), bahwa, melaksanakan kajian partisipasi politik, dapat menggunakan, ukuran partisipasi politik, seperti berikut ini: (a) Kegiatan pemilihan, (b) Lobbying, (c) Kegiatan organisasi, (d) Mencari koneksi (*contacting*) dan (e) Tindakan kekerasan (*violence*).

*Pertama*, Partisipasi politik perempuan dalam kegiatan pemilihan, Ambivalensi partai yang cenderung mendua dalam melihat perempuan adalah gambaran dari sikap masyarakat kita yang belum sepenuhnya melihat perempuan sebagai kekuatan perubahan dalam masyarakat. Paradigma lama bahwa perempuan sebagai kaum yang lemah dan terbatas serta hanya berfungsi sebagai pelengkap kaum Adam, masih cukup dominan menghinggapi cara berpikir mayoritas masyarakat di Kota Palu. Di era globalisasi ini, seharusnya kaum perempuan bukan lagi diposisikan sebagai warganegara kelas dua, di bawah bayang-bayang kekuasaan kaum laki-laki, tetapi harus diposisikan dan dijadikan sebagai mitra yang mempunyai harkat, martabat serta derajat yang sama. Politik yang santun dan dewasa dalam masyarakat memang masih sulit diperankan oleh siapapun. Dewasa ini justru yang menonjol adalah politik yang menghalalkan segala cara demi mencapai kepentingan dan target yang sifatnya oportunistik dan financial semata. Itu sebabnya politisasi atas nama agama, tradisi dan etnisitas yang mengemuka dan sering menjadi biang konflik horizontal tak lebih dari

kreasi yang namanya politik atas nama kepentingan serta tujuan tertentu dalam melanggengkan *status quo*.

Partisipasi perempuan dalam politik, dalam penelitian ini difokuskan pada partisipasi perempuan dalam kegiatan kepartaian seperti aktifitas pemilu yakni sebagai peserta pemilu. Untuk indikator kegiatan pemilihan, akan dijelaskan keterlibatan kader perempuan dalam kampanye politik dalam pemilu. Komitmen perempuan sebagai peserta pemilu, menjadi faktor penunjang termotivasinya caleg perempuan, menjadi pemenang pemilu, karena pada dasarnya perempuan memiliki potensi untuk menjadi pemenang pemilu, karena diharapkan perempuan yang menjadi pemilih dapat memilih kandidat perempuan, yang dapat mewakili hak suara mereka demi kepentingannya di bidang politik.

Di Kota Palu cukup banyak terdapat kader perempuan partai politik yang masuk dalam struktur kepengurusan partai, khususnya pada partai-partai peserta Pemilu yaitu parpol yang berhak mengajukan calon kepala daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 59 Ayat 2 UU No.32/2004, yaitu partai yang memiliki 15% suara sah dalam Pemilu DPRD tahun 2009 yang lalu. Gambaran tentang pengurus Parpol (sampel) di Kota Palu pada tahun 2009 dapat dilihat pada Jadwal 1 berikut ini.

**Jadwal 1. Jumlah Pengurus Partai Politik (Sampel) di Kota Palu Tahun 2012**

<b>Nama Partai</b>	<b>Jumlah Pengurus</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>% Perempuan</b>
Partai Golkar	101	69	32	31.68
Partai Amanat Nasional	28	18	10	35.71
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	26	22	4	15.38

Sumber: Struktur Kepengurusan Partai Politik Di Kota Palu, Tahun 2010

Proses penunjukan tentu saja didasarkan pada berbagai kriteria. Dalam proses itu penunjukan banyak ditujukan pada kader laki-laki karena mereka menganggap kinerja dari kader laki-laki lebih unggul dari perempuan karena perempuan memiliki beban ganda seperti tanggung jawabnya terhadap suami dan anaknya dirumah yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja untuk ikut terlibat dalam kegiatan partai, seperti mengikuti kampanye dan terlibat berkampanye, yang memerlukan waktu, yang tidak dapat dipastikan mulai dan selesainya kegiatan tersebut.. Selain itu kader perempuan sebagai minoritas dalam partai merasa tidak mempunyai kemampuan dan rasa percaya diri untuk bisa bersaing dengan kader laki-laki dengan jumlah mayoritas, serta memiliki pengalaman kepartaian yang sudah matang.

Menurut Muhammad Wartabone, menjelaskan, bahwa:

Partisipasi perempuan, dalam keikutsertaan dalam kampanye politik, merupakan kendala yang sangat krusial, karena perempuan dari segi kemampuan tidak diragukan, apalagi kader perempuan yang sudah berpengalaman dipartai politik, hanya saja yang merupakan kendala adalah pembagian waktu dan adanya budaya yang tidak membenarkan perempuan beraktivitas di malam hari, dan jauh dari keluarga, sehingga saya melihat perempuan pada tahapan kampanye sudah kalah dengan laki-laki. (wawancara, 5 November, 2012).

Penjelasan dari informan diatas, menjelaskan bahwa kurangnya partisipasi perempuan dalam melakukan kampanye, bukan disebabkan karna faktor SDM semata, namun lebih kepada komitmen kader perempuan yang masih lemah, karena keterikatan peran ganda, antara kegiatan politik disatu sisi dan kegiatan rumah tangga dilain sisi.

Menurut Ani Suriani SPd, bahwa,

Kurangnya partisipasi perempuan pada kegiatan partai, seperti dalam kegiatan kampanye, disebabkan, karena, masih adanya, anggapan dari kader perempuan sebagai minoritas dalam partai merasa tidak mempunyai kemampuan dan rasa percaya diri untuk bisa bersaing dengan kader laki-laki dengan jumlah mayoritas, serta memiliki pengalaman kepartaian yang sudah matang, padahal kalau dilihat dari segi SDM sebenarnya kami mampu, hanya saja kepercayaan diri yang masih kurang, terutama tampil didepan forum dalam mempresentasikan ide dan gagasan, apalagi untuk menjadi jurkam, sangat kurang percaya. (Wawancara, 5 November, 2012).

Penjelasan dari Ani Suriani, tentang kurangnya partisipasi perempuan dalam kegiatan kepartaian, terutama dalam aktivitas kampanye, mendapatkan tanggapan dari Andi patongai, bahwa:

Kalau saya ditanya tentang partisipasi perempuan dalam partai politik, saya katakana cukup baik, hanya saja kalau saya melihat, hambatan yang sangat krusial adalah perempuan ini, selalu terbawa dengan tugas dan fungsi domestiknya, sebagai ibu rumah tangga, sehingga apabila akan melaksanakan kampanye, diluar rumah dengan waktu, yang sulit ditentukan selesainya, maka perempuan-perempuan kader akan berfikir, dan kalau saya lihat, mereka lebih memilih untuk tidak ikut, karena memikirkan anak dan suami, jadi bukan faktor SDM semata, tapi faktor kondisi keluarga. (Wawancara, 6 November, 2012).

*Kedua*, Partisipasi Politik Perempuan dalam Aktivitas Lobbying, *Lobbying* yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah, merupakan usaha yang dilaksanakan oleh kader perempuan yang menjadi pengurus partai politik, untuk mempengaruhi pihak-pihak yang menjadi sasaran untuk kepentingan partainya, agar terbentuk sudut pandangan positif terhadap program yang ditawarkan partai, dengan demikian kegiatan lobi yang dilaksanakan oleh kader politik perempuan diharapkan memberikan dampak positif bagi pencapaian tujuan partai politik.

Untuk melakukan *lobbying*, perempuan partai politik, memiliki wawasan dan pengetahuan cukup luas terhadap substansi lobi, memiliki pergaulan yang luas, memiliki penampilan yang menarik, dengan reputasi baik, memiliki kontak yang paling penting dengan pihak-pihak legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, Tokoh masyarakat / LSM yang sudah dikenal, Kalangan jurnalis (wartawan, reporter, redaktur) yang berpengaruh dan memiliki kekuatan untuk membentuk opini Pembuat undang-undang, pejabat pemerintahan, pimpinan partai politik, dan lain sebagainya.

Bentuk *lobbying* perempuan partai politik, dapat dilihat pada saat melakukan pertemuan-pertemuan guna menggalang koalisi dengan organisasi-organisasi lain, dimana koalisi ini membawa berbagai kepentingan dan tujuan-tujuan dalam mengintegrasikan langkah menghadap wakil-wakil legislative, mengumpulkan informasi dan mempersiapkan laporan untuk legislator yang mewakili posisi partai dalam isu-isu kunci, melakukan kontak dengan individu-individu yang berpengaruh dan wakil-wakil dari badan-badan yang dapat memberi kontribusi untuk pengembangan partai, terutama yang dapat memberikan sumbangan kampanye untuk kemenangan partai.

Menurut Muhammad Wartabone, menjelaskan, bahwa:

Partisipasi perempuan, dalam lobbying untuk kepentingan partai, sangat diperlukan, mengingat perempuan memiliki keahlian melobi dibandingkan laki-laki, namun yang saya maksudkan disini, bukan keahlian lobbying dalam arti negative, tapi positif, seperti perempuan memiliki sifat yang lebih halus, menyampaikan permintaan dengan mempertimbangkan factor perasaan, dan yang terpenting memiliki kepekaan yang cukup baik dibanding laki-laki. Dengan kemampuan tersebut, perempuan partai politik dapat menggolkan misi organisasi yang menjadi tanggung jawabnya. (Wawancara, 5 November, 2012).

Penjelasan dari informan diatas, menjelaskan bahwa perempuan partai politik dalam partisipasi dalam melobby dapat dikatakan cukup baik, karena perempuan memiliki keahlian melobi dibandingkan laki-laki, dipertegas, bukan keahlian lobbying dalam arti negative, tapi positif, dimana

perempuan dapat menggolkan satu misi organisasi yang diembannya dengan memiliki sifat yang lebih halus, menyampaikan permintaan dengan mempertimbangkan factor perasaan, dan yang terpenting memiliki kepekaan yang cukup baik dibanding laki-laki.

Menurut Ani Suriani SPd, bahwa,

Bahwa untuk lobbyng, memang perempuan dapat dikatakan lebih berhasil melakukan pekerjaan tersebut, namun jangan dijadikan alasan bahwa, kami bisa melobbyng, hanya karena memiliki perasaan halus, penampilan yang menarik dan tutur kata yang halus, tapi kami dalam melakukan pekerjaan tersebut dengan punya komitmen dan kepekaan terhadap objek yang menjadi materi lobbyng, sehingga dalam melakukan komunikasi politik kami tidak terjebak pada hal-hal yang merugikan partai dan diri sendiri (Wawancara, 5 November, 2012).

Penjelasan dari Ani Suriani, tentang partisipasi lobbyng bagi perempuan partai politik yang harus memiliki komitmen dan kepekaan serta penguasaan yang baik pada substansi materi lobbyng, mendapatkan tanggapan dari Andi Patongai, bahwa:

Kalau saya ditanya tentang partisipasi perempuan dalam partai politik, khususnya dalam melakukan lobi politik, saya mengatakan masih rendah, hanya saja kalau perempuannya mau menjalankannya dengan baik tanpa beban ganda, seperti dibayang-bayangi dengan tugas dan fungsi sebagai ibu rumah tangga, saya yakin perempuan yang ada dalam partai politik dapat memerankan lobi politik dengan baik, karna mereka itu memiliki kehalusan dalam bertutur kata dan bertindak, hanya saja sampai sekarang saya belum lihat itu secara maksimal. (Wawancara, 6 November, 2012)

Penjelasan diatas, tentang kurangnya partisipasi perempuan partai politik yang ada di Kota Palu dalam melakukan lobi-lobi politik, mendapat tanggapan dari Ernawati, bahwa:

Untuk melakukan lobi politik secara maksimal, kami perempuan bisa melaksanakannya, dengan bekal kemampuan yang kami punyai, seperti yang biasa didengar dimasyarakat, bahwa perempuan memiliki kemampuan lobi karena penampilan, perasaan dan komitmen yang tinggi terhadap tugas, tentunya disertai kemampuan SDM, hanya saja perempuan tidak percaya diri untuk melakukan itu. Karena takut mendapat stigma negative dari masyarakat, terutama keluarga. (Wawancara, 6 November, 2012).

*Ketiga*, Partisipasi perempuan dalam kegiatan organisasi, Partisipasi politik perempuan dalam kegiatan organisasi, adalah keterlibatan perempuan partai dalam melaksanakan kegiatan partai, khususnya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan partai dalam perumusan suatu kebijakan partai. Diakui walaupun saat ini hak-hak politik bagi perempuan sudah banyak diakui, namun adanya hak-hak politik tersebut tidak menjamin adanya pemerintahan/sistem politik yang demokratis dimana asas partisipasi, representasi dan akuntabilitas diberi makna yang sesungguhnya, dalam keterlibatan perempuan pemberian akses untuk dapat mempengaruhi kebijakan organisasi/partai politik.

Menurut Muhammad Wartabone, menjelaskan, bahwa:

Posisi, peran dan aktivitas perempuan pada partai politik, terutama dalam memberikan pemahaman, saran dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan partai, dapat saya katakan masih sangat rendah, kenapa karena saya melihat perempuan dipartai politik yang ada di Kota Palu, kurang memiliki kepercayaan diri dalam menyampaikan aspirasinya, selain itu kurang menguasai substansi yang akan dibicarakan dalam perumusan program organisasi, sehingga partisipasinya sangat rendah, dalam mempengaruhi kebijakan partai. (Wawancara, 5 November, 2012).

Pendapat yang sama, tentang rendahnya partisipasi perempuan partai politik dalam mempengaruhi keputusan partai, mendapat penjelasan yang sama dari Ani Suriani SPd, bahwa,

Kurangnya partisipasi perempuan dalam memberikan ide dan gagasan dalam perumusan kebijakan partai, terpulang dari perempuan itu sendiri, dimana sangat sulit mengemukakan aspirasinya, karena kurang percaya diri dihadapan pengurus partai yang laki-laki, selain itu saya melihat perempuan-perempuan tersebut kurang menguasai apa yang akan dibicarakan, sehingga pada saat mendapatkan peluang untuk berbicara, mereka tidak bisa, akhirnya program yang ada tidak memihak kepada perempuan. (Wawancara, 5 November, 2012).

Penjelasan dari Ani Suriani, tentang kurangnya partisipasi perempuan dalam kegiatan kepartaian, terutama dalam mempengaruhi partai politik di Kota Palu, dalam pengambilan keputusan, mendapatkan tanggapan dari Andi patongai, bahwa:

Partisipasi perempuan dalam partai politik, dilihat dari pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan partai, sangat rendah, karena kalau perempuan dalam rapat hanya diam, walaupun memberi masukan kurang mendapatkan tanggapan, karena substansi yang dibicarakan tidak fokus dan tidak sitimatis, selain itu banyak yang hanya menghadiri rapat tidak mau bicara, padahal peluang sudah diberikan, sehingga saya dapat katakan bahwa mereka tidak dapat mempengaruhi kebijakan partai. (Wawancara, 6 November, 2012).

Rendahnya partisipasi perempuan dalam mempengaruhi kebijakan partai perempuan, karena substansi yang dibicarakan tidak fokus dan tidak sitimatis, selain itu perempuan partai politik di Kota Palu, kurang memanfaatkan peluang bicara yang diberikan oleh partai, manakala partai memberi kesempatan dalam menyampaikan aspirasi, banyak yang hanya menghadiri rapat tidak mau bicara, padahal peluang sudah diberikan, sehingga mereka tidak dapat mempengaruhi kebijakan partai, walaupun tidak dapat dipungkiri mereka cukup rajin menghadiri rapat-rapat partai, namun tingkat keaktifan untuk menyampaikan pendapat dan argumentasi masih rendah yakni baru 20 persen yang aktif. Penjelasan tersebut mendapat penjelasan dari Ernawati, bahwa:

Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, harus diakui jauh dari laki-laki, apalagi kita melihat, bahwa pengurus partai lebih banyak dan mempunyai pengalaman kepartaian yang sudah lama, sehingga dalam mempengaruhi kebijakan partai lebih besar. Selain itu kemampuan intelektual perempuan dalam mempresetansikan idenya dalam bentuk bicara, sangat lemah karena kurang percaya diri, selain itu ada anggapan dari teman-teman-teman bahwa ide perempuan bisa didengar tapi tidak usah diikuti, itu yang semakin melemahkan kepercayaan diri perempuan dalam member komentar pada kegiatan kepartaian. (Wawancara, 6 November, 2012).

*Keempat*, Partisipasi perempuan dalam mencari koneksi, Partisipasi politik merupakan konsep demokrasi, dan hanya akan memiliki arti dinamis dan sejati pada saat partai politik dengan kebijakan, berpihak dan diputuskan oleh laki-laki dan perempuan bersama-sama secara adil dengan mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak. Partisipasi perempuan dalam dimensi mencari koneksi, lebih difokuskan, dimana perempuan partai menerima manfaat dari kebijakan partai dimana ia bernaung.

Partai politik tidak boleh berdiri sendiri, dan wajib hukumnya mempromosikan kader-kader perempuan yang ada dalam internal partai politik, dimana perempuan tersebut berada. Kekuatan hokum yang mendasari partisipasi perempuan dalam rana politik, terlihat dengan ditetapkannya, Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengaruh utama Gender menjadi dasar pijakan politis bagi perempuan untuk berpartisipasi di dalam pembangunan. Salah satu hal untuk mengeliminasi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan adalah tindakan affirmative, yang diantaranya diimplementasikan dalam hal keterwakilan perempuan di parlemen dan partai politik dengan diundangkan secara formal dalam pasal 65 Undang-Undang Pemilu No. 12 tahun 2003. Walaupun ketentuan pasal 65 Undang-Undang Pemilu No. 12 tahun 2003 ini tidak senafas dengan ketentuan yang dianut dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 C ayat (2) Perubahan Kedua, dan Pasal 28 D

ayat (3) perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945, laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam berpartisipasi di bidang politik. Menurut Muhammad Wartabone, menjelaskan, bahwa:

Posisi tawar yang rendah pada partai politik, sangat mempengaruhi rendahnya manfaat yang diterima oleh perempuan, karena perempuan tidak pernah memanfaatkan peluang yang ada pada partai dalam pengambilan keputusan partai, sehingga kebijakan partai kurang berpihak kepada perempuan, akibatnya Perempuan dipartai selalu menjadi warga nomor dua. (Wawancara, 5 November, 2012).

Pendapat yang sama, tentang rendahnya manfaat yang diterima oleh perempuan partai politik, karena rendahnya kontribusi dalam mempengaruhi keputusan partai, dikemukakan pula oleh Ani Suriani SPd, bahwa,

Manfaat yang diterima perempuan dalam kegiatan partai sangat ditentukan kontribusi yang diberikan kepada partai, kita melihat sekarang, apakah perempuan sudah memberikan yang terbaik untuk pengembangan partainya, ternyata dapat dikatakan kurang sebanding laki-laki yang menjadi anggota partai, sehingga partai selalu menunjuk laki-laki terbanyak, sebagai penerima manfaat, karena kontribusi laki-laki lebih besar dari perempuan. Inilah yang menjadi penyesalan saya, kenapa perempuan hanya selalu ingin dibelakang layar, apabila diperlukan dalam pengambilan keputusan, padahal mereka mampu dari segi pendidikan. (Wawancara, 5 November, 2012).

Penjelasan dari Ani Suriani, tentang kurangnya perempuan menerima manfaat dari kegiatan politik, mendapatkan tanggapan dari Andi patongai, bahwa:

Besarnya perempuan menerima manfaat dari kegiatan partai politik, sangat ditentukan seberapa besar perempuan mempengaruhi pengambilan keputusan partai, yang saya lihat perempuan dalam rapat hanya diam, sehingga program yang ada sangat kurang memperhatikan keperluan perempuan. (Wawancara, 6 November, 2012)

Rendahny perempuan menerima manfaat dari setiap kegiatan partai, sangat terlihat sekali dari rendahnya dalam member kontribusi pada pengembangan partai, dapat dilihat dari kurangnya berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan kepartaian, sehingga kepercayaan partai tidak ditujukan kepada perempuan. Penjelasan tersebut mendapat penjelasan dari Ernawati, bahwa:

Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, harus diakui jauh dari laki-laki, apalagi kita melihat, bahwa pengurus partai lebih banyak dan mempunyai pengalaman kepartaian yang sudah lama, sehingga dalam mempengaruhi kebijakan partai lebih besar. Selain itu kemampuan intelektual perempuan dalam mempresetansikan idenya dalam bentuk bicara, sangat lemah karena kurang percaya diri, selain itu ada anggapan dari teman-teman bahwa ide perempuan bisa didengar tapi tidak usah diikuti, itu yang semakin melemahkan kepercayaan diri perempuan dalam memberi komentar pada kegiatan kepartaian, akibatnya perempuan kurang mendapat peluang dalam menerima manfaat dari partai. (Wawancara, 6 November, 2012).

Harus diakui, bahwa perempuan partai politik yang ada di Kota Palu, kurang menerima manfaat dari partainya, terlihat sekali dari, komposisi pengurus partai sampel, perempuan yang memegang posisi penting dalam partai (PDIP) hanya, 15.38%, Golkar (31.68%) dan PAN (35.71%). Dari data tersebut dapat disimpulkan, bahwa perempuan dari segi struktur organisasi sudah terwakilkan namun kurang menerima manfaat. (Observasi, 8 November 2012).

*Kelima*, Partisipasi politik perempuan dalam tindakan kekerasan, politik merupakan suatu proses interaksi yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari dimana sejumlah nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif bagi suatu masyarakat. Kata “nilai” menunjuk kepada suatu hal berharga pada masyarakat. Bentuknya dapat berbeda dari satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Nilai

(*valuable*) yang dimiliki seseorang dipandang oleh warga masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam penyelenggaraan kepentingan bersama. Sesuatu yang langka dalam kehidupan sehari-hari, yang paling banyak dicari orang, diusahakan oleh orang untuk diperoleh. Kalau perlu dengan berbagai macam cara (mulai dengan cara persuasif sampai dengan cara kekerasan, dan bahkan dengan cara pertumpahan darah) untuk memperoleh dan mempertahankannya.

Menurut Muhammad Wartabone, menjelaskan, bahwa:

Saya melihat, perempuan yang menjadi pengurus partai di Kota Palu, jiwa kompetisinya sangat rendah, dalam berpolitik, karena dalam politik, segala strategi digunakan untuk menggonakan kepentingan dan kekuasaan, kalau perlu menyakiti pesaing, dengan perinsip tersebut, perempuan takut masuk dalam dunia politik. (Wawancara, 5 November, 2012).

Sulitnya perempuan mengikuti kompetisi kepartaian, dengan menghalalkan segala cara untuk merebut kekuasaan, mendapat tanggapan dari, Ani Suriani SPd, bahwa,

Cara berpolitik laki-laki yang cenderung keras, sangat sulit diikuti oleh perempuan, bahkan menakutkan bagi perempuan, kalau saya, mereka mempunyai strategi keras, saya akan memperlihatkan kemampuan berpolitik saya dengan kesantunan, dan menggunakan potensi yang saya miliki, untuk mendapatkan kekuasaan. Yang perlu diperlihatkan adalah kemampuan intelektual dan kemampuan memenej emosi, serta memperlihatkan karya nyata, masyarakat sudah pintar menilai, yang mana yang benar dan mana yang salah, untuk dijadikan representative wakil mereka. (Wawancara, 5 November, 2012).

Penjelasan dari Ani Suriani, tentang kemampuan berpolitik perempuan yang mengandalkan cara-cara santun, dengan menghindari strategi politik cara berpolitik laki-laki yang cenderung keras, untuk mendapatkan kekuasaan. Dikomentari oleh Andi Patongai, bahwa:

Cara berpolitik yang keras memang dipunyai oleh laki-laki dalam berpolitik, tapi bukan berarti tidak mengandalkan kemampuan, karena sekarang ini, kalau hanya mengandalkan kekerasan, tidak akan mendapat kepercayaan dari masyarakat, karena masyarakat sudah cerdas memilih wakilnya, yang akan mampu menyampaikan aspirasinya, hanya saja kalau diharuskan menggunakan kekerasan akan dilakukan, tapi bukan itu solusinya dalam menggonakan suatu tujuan. (Wawancara, 6 November, 2012).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Bahwa Partisipasi perempuan dalam Partai Politik di Kota Palu belum berjalan dengan baik, karena lima dimensi yang diujikan dilapangan, yaitu Kegiatan Pemilihan, Lobbyng, Kegiatan Organisasi, Mencari Koneksi dan Tindakan Kekerasan, tidak dilaksanakan dengan baik, karena Posisi tawar perempuan sangat rendah, hal ini dari hasil penelitian penulis dapat diungkapkan bahwa partai politik pada wilayah kota Palu tidak memberikan ruang dalam pengambilan keputusan partai. Walau demikian kemampuan intelektual perempuan dalam mempresentasikan idenya, melakukan lobbyng politik dan dalam melakukan kegiatan partai lainnya sangat baik dan hati-hati, namun kebijakan partai kurang berpihak kepada perempuan, akibatnya perempuan dipartai selalu menjadi warga nomor dua. Setelah mencermati kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka beberapa saran yaitu: (1) Untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam partai politik, kiranya perlu adanya pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai berbasis pendidikan politik perempuan. (2) Perlunya regulasi kepartaian yang konsisten dalam mendukung partisipasi perempuan, melalui penerapan sanksi yang tegas yang tidak mencantumkan 30% perempuan dalam kepengurusan dan kegiatan kepartaian. (3) Perlunya komitmen yang konsisten dari ketua partai dalam menerapkan kebijakan yang tanpa pandang bulu, dalam memberi kepercayaan kepada kadernya untuk berpartisipasi dalam pengembangan diri. (4) Perempuan yang akan terjun kepartai politik, kiranya membekali diri dengan keterampilan organisasi, pengetahuan tentang kepartaian dan sumber daya manusia yang baik, melalui penguatan pendidikan formal.

**RUJUKAN**

- Huntington, S.P. & Nelson, J. 1994. *Partisipasi politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Moleong, J. L. 2000. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Redmaja Rosda Karya.
- Nasir, M. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Singarimbun & Sofian, E. 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.

Samsinar Z Moga, M.Si.  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Tadulako,  
Palu, Sulawesi Tengah,  
Indonesia  
Email: inarzaid.73@gmail.com